



Reservasi Hotel Nyaris Penuh

■ Berharap Wisata Buka di Akhir Tahun

Sampai dengan saat ini reservasi di periode tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 mencapai 70 persen.

Deddy Pranowo Eryono
Ketua PHRI DIY

YOGYA, TRIBUN - Mendekati libur perayaan Natal 2021 dan tahun baru 2022 (Nataru) tingkat pemesanan atau reservasi kamar hotel Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah mencapai 70 persen. Kendati ada rencana pemerintah pusat menyeragamkan level PPKM diseluruh wilayah Jawa-Bali dan wilayah lainnya menjadi level 3, namun tampaknya hal itu tidak berpengaruh bagi pengusaha hotel di DIY. "Sampai dengan saat ini reservasi di periode tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 mencapai 70 persen. Kami berharap selalu kondusif dan baik-baik

saja ke depannya," ucap Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, Senin (22/11). Dia berharap pe-

rintah tidak mengeluarkan kebijakan yang berdampak buruk terhadap industri pariwisata, termasuk penyedia jasa hotel. Deddy juga meminta, supaya wacana soal penerapan PPKM level 3 di semua wilayah di Indonesia saat akhir tahun nanti tidak berimbas signifikan terhadap dunia pariwisata di DIY. Sebab, menurutnya penerapan protokol kesehatan yang

● ke halaman 11

MENYAMBUT LIBUR NATARU

- Penerapan PPKM Level 3 pada libur Nataru cukup membuat para pelaku wisata resah.
- Saat ini para pelaku wisata di DIY mulai menggeliat setelah ada kelonggaran mobilitas warga.
- Tingkat reservasi hotel saat libur Nataru pun diklaim sudah mencapai 70%.
- Pemerintah dan pelaku wisata berharap tidak ada penutupan wisata.
- Sampai saat ini pemda masih menunggu petunjuk teknis mengenai PPKM Level 3 dari pemerintah pusat.
- Hingga kini Pemda DIY belum ada rencana melakukan penyekatan perbatasan.
- Pemda DIY pun sampai sekarang menyatakan tidak akan menutup objek wisata pada libur Nataru.
- Pembatasan yang bisa diterapkan adalah kuota pengunjung, kontrol penerapan prokes, dan skema akses satu pintu bagi bus pariwisata.



GRATIS/FAUZIA RAKHM

Reservasi Hotel

• Sambungan Hal 1

ketat dan disiplin adakah kunci dalam mencegah penyebaran Covid-19. "Kami berharap agar semuanya bisa berjalan berdampingan. Artinya pemerintah juga memikirkan soal pariwisata sambil kesehatan dijaga dengan optimal. Kami juga terbuka, misal ada anggota kami atau pelaku pariwisata yang melanggar langsung ditindak tegas," imbuhnya.

Di sisi lain, dia menyebutkan bahwa Kota Yogyakarta juga sudah menerapkan kebijakan skrining yang ketat terhadap wisatawan dengan skema satu pintu masuk bagi bus pariwisata. Sistem itu menurutnya merupakan langkah yang tepat dalam mencegah potensi lonjakan kasus Covid-19.

"Itu saya pikir bagus sebagai langkah skrining, sehingga berlapis. Ketika wisatawan masuk dicek, kemudian saat di hotel juga diperiksa kembali. Soal vaksinasi kan kita juga signifikan. Nah, ini yang memang perlu dijaga. Kami senantiasa berharap bahwa ke depan kondisinya tetap kondusif," pungkasnya.

Tunggu aturan

Dinas Pariwisata (Dinpar) Kabupaten Sleman hingga kini masih menunggu aturan lebih detail mengenai rencana Pemerintah Pusat yang bakal menerapkan PPKM level 3 saat libur Nataru di seluruh wilayah Indonesia. Nantinya, meskipun PPKM akhirnya ditingkatkan ke Level 3, diharapkan tidak ada penutupan destinasi wisata.

"Intinya, kami masih menunggu pengaturan lebih detail melalui Inmendagri (instruksi menteri dalam

negeri). Ingub maupun Inbup. Kita berharap tidak ada penutupan destinasi wisata yang telah memenuhi syarat. Seperti memiliki sertifikat CHSE dan kode batang aplikasi PeduliLindungi," kata Kepala Dinpar Sleman, Suparmono kepada wartawan, Senin (22/11).

Penerapan PPKM Level 3 yang dibarengi dengan sejumlah pengetatan tentu akan berdampak pada sektor wisata. Di mana okupansi jumlah kunjungan diprediksi akan menurun. Sebab, apabila mengacu pada aturan PPKM level 3 sebelumnya, maka kapasitas pengunjung dibatasi hanya 25 persen.

Kemudian, anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan masuk ke destinasi wisata. Lalu, wajib memiliki sertifikat CHSE dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Sampai saat ini, ada sekitar 155 destinasi wisata, termasuk hotel dan restoran di Bumi Sembada yang sudah mengantongi sertifikat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut.

Menyambut libur Nataru, Suparmono sebelumnya mengungkapkan, jawabannya tidak akan menggelar even apapun di destinasi wisata. Sebab, menghindari penumpukan wisatawan yang berpotensi menimbulkan kerumunan di masa PPKM Level 2 ini.

Meski demikian, ia mengizinkan masing-masing pengelola wisata untuk menggelar kegiatan di malam pergantian tahun. Asalkan, tetap mematuhi protokol kesehatan dan berpedoman pada Intruksi Bupati tentang pengendalian Covid-19. Seperti mematuhi jam operasional dan kapasitas pengunjung.

"Sampai saat ini belum ada larangan. Jadi, boleh menggelar kegiatan di malam pergantian tahun. Silakan, dengan catatan sesuai inbup, ya. Tapi kalau nanti ada keputusan lain dari pemerintah pusat, ya, kami akan menyesuaikan," jelas dia.

Dinas Pariwisata sendiri tidak akan menggelar even apapun di malam pergantian tahun. Semua personel, tenaganya akan diterjunkan untuk membantu penerapan Protokol Kesehatan di destinasi wisata di Bumi Sembada. Terutama destinasi favorit yang memungkinkan banyak dikunjungi wisatawan.

"Seperti di Klangon, Teras Merapi, maupun di Kaliurang. Malam pergantian tahun baru, kita akan terjunkan semua personel, lebih kurang 60-70 personel untuk membantu penerapan protokol kesehatan," jelas Suparmono.

Sementara itu, Pemkab Bantul berharap pemerintah pusat tetap memperbolehkan adanya aktivitas pariwisata saat libur Nataru, walaupun ada pembatasan-pembatasan yang diterapkan. "PPKM level 3 dari 24 Desember hingga 2 Januari itu insyaallah tidak menutup aktivitas pariwisata, cuma se-Indonesia nanti level 3 semua. Memang ada pembatasan-pembatasan, kita menunggu regulasi terakhir saja," ungkap Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Kwintarto Heru Prabowo, Senin (22/11).

Ia pun mengadopsi pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarman Baskara Aji yang menyampaikan bahwa level 3 akhir tahun itu tidak sama dengan level 3 yang sebelumnya diterapkan. Dalam aturan PPKM level 3 sebelumnya, destinasi pariwisata memang tidak diper-

bolehkan untuk beroperasi. Namun ia menyatakan, bahwa dalam PPKM level 3 di akhir tahun nanti, ada kemungkinan destinasi pariwisata boleh buka, namun dengan pembatasan-pembatasan.

"Tetapi catatannya melihat perkembangan, kalau sebelum tanggal 24 Desember kasus tidak terkendali, pasti levelnya naik. Tapi level 3 hanya untuk pengendalian dengan memberlakukan pembatasan-pembatasan, kalau toh pariwisata boleh buka harus dengan pola yang ketat," imbuhnya.

Jangan gelisah

Ia menyatakan bahwa hampir dipastikan seluruh wilayah Indonesia akan menerapkan PPKM Level 3. Namun pihaknya juga akan menunggu aturan dari pusat, dan melihat turunannya dalam Instruksi Gubernur dan Bupati. Ia pun mengimbau agar masyarakat dapat bersabar dan tetap menunggu aturan dari pusat. "Untuk masyarakat jangan gelisah dulu, semua ada ketentuannya, kita belum tentu tutup kok. Tapi saya juga tidak menjamin pasti bisa buka," tandasnya.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa Pendapat Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata saat ini hampir menyentuh Rp10 miliar dari target akhir tahun sekitar Rp14,6 miliar. Dengan sisa waktu tersebut, Kwintarto menyatakan bahwa target itu akan sulit terpenuhi.

"Biasanya akhir tahun bisa Rp3-4 miliar. Waktunya sudah tidak memungkinkan untuk mengejar PAD, apalagi dengan wacana PPKM level 3, meski tidak bisa tercapai Rp4 miliar, besok kalau normal Rp2 miliar bisa masuklah," tandasnya. (hda/rif/nto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005